

## **ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

ANNA YULIANITA

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,  
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

### **ABSTRACT**

*This research analyzes the government expenditure and its effect on the leading economic sector of Regency of OKI for the period 1996-2007. Intention of this research in analyzing pre-eminent economic sector which is there are in region of Ogan Komering Ilir, and analyze the influence of government expenditure to pre-eminent value output economic sector in this region.*

*From the result analyze of the LQ, there are three potential sector/exceeding that is agricultural sector, building sector, and commercial sector, hotel and restaurant. While from calculation Shazam by using the Simple Regression got the government expenditure have an affect on positive to PDRB of agricultural sector, building sector, and commercial sector, hotel and restaurant.*

*Key words : Government Expenditure, Potential Economic Sector, PDRB, Location Quotient (LQ).*

---

### **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya pembangunan regional tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan pembangunan nasional, salah satu sasaran pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (wilayah). Untuk mencapai sasaran di atas bukanlah pekerjaan ringan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimilikinya.

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat local, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat banyak dan mendorong perekonomian untuk maju.

Bila memperbandingkan pertumbuhan antara daerah, maka akan ditemui kenyataan bahwa ada daerah yang tumbuh lebih cepat diantaranya disebabkan oleh struktur ekonominya sebagian besar mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Sebaliknya bagi daerah yang pertumbuhannya lambat, sebagian besar sektor ekonominya mempunyai laju pertumbuhan yang lambat.

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

luas. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah atau daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Di samping analisis pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dapat pula digunakan untuk menentukan arah pembangunan yang akan datang.

Arsyad menjelaskan bahwa setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada berupaya menginventarisir potensi sumber daya ada untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Total pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain. Jika akan membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan, dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Arsyad, 1999:109).

Kesungguhan pemerintah dalam membangun daerah ini diukur dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah Otonomi daerah. Untuk mendukung hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang 22 Nomor Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang lebih besar (*local discretion*) kepada daerah untuk merancang berbagai program pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat (*local needs*).

Sejak Otonomi Daerah tersebut diberlakukan, peran pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri semakin besar. Tuntutan untuk mampu membiayai urusan rumah tangga tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah daerah beserta perangkatnya harus bekerja keras agar mampu menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah untuk pelayanan terhadap masyarakat.

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dihitung melalui Produk Domestik Bruto (PDRB) yang rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya, artinya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya sangat lambat maka hal ini dapat menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregatif. Sebaliknya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap totalitas perekonomian maka sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus akan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya angka PDRB sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan sumber daya yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah berkaitan erat dengan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan identifikasi terhadap wilayah perencanaan dan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah perencanaan meliputi berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki

daerah. Sehingga perencanaan pembangunan suatu daerah diarahkan untuk mengelola sumber daya daerah sehingga dapat menunjang pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKI didukung adanya sektor ekonomi unggulan yang dapat dijadikan potensi daerah bagi perkembangan daerah tersebut. Menurut Taufik dan Saleh (2000:2) hal ini sangat penting karena sektor tersebut dapat memberikan dua sumbangan sebagai berikut: 1) Secara langsung menimbulkan kenaikan pada pendapatan faktor-faktor produksi daerah dan pendapatan daerah; dan 2) Menciptakan permintaan atas produksi industri lokal.

**Tabel 1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007**

No	Kecamatan	Luas Daerah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Ogan Komering Ulu	370.192	11	140	10
2.	Ogan Komering Ilir	1.705.832	18	285	11
3.	Muara Enim	858.974	22	282	21
4.	Lahat	663.250	24	513	19
5.	Musi Rawas	1.213.457	21	242	19
6.	Musi Banyuasin	1.447.700	11	209	9
7.	Banyuasin	1.214.274	15	273	11
8.	OKU Selatan	457.033	19	234	7
9.	OKU Timur	340.440	20	265	7
10.	Ogan Ilir	239.324	16	227	14
11.	Empat Lawang	-	-	-	-
12.	Palembang	37.403	16	0	107
13.	Prabumulih	42.162	6	15	22
14.	Pagar Alam	57.916	5	0	35
15.	Lubuk Linggau	41.980	8	0	72
Jumlah		8.689.937	212	2.685	364

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2007

Dalam menciptakan peningkatan pertumbuhan ekonomi ini, peran pemerintah sangat besar dalam memberikan kontribusi dengan suatu kebijakan untuk mengalokasikan pengeluaran pemerintah dengan memprioritaskan sektor unggulan. Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan pembangunan pada sektor unggulan memungkinkan pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dan secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan penduduk Kabupaten OKI.

Kewenangan otonomi luas yang mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintah baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, maka daerah harus mengembangkan sumber dayanya terutama sumber daya manusia dalam upaya untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah Kabupaten OKI sehingga tidak tertinggal dengan daerah-daerah lainnya.

Salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya pembangunan antar daerah dan kawasan. Pendekatan pengembangan wilayah tersebut dilakukan melalui penempatan tata ruang yang bertujuan untuk mengembangkan pola dan struktur ruang nasional melalui pendekatan wawasan dan implementasikan melalui penetapan kawasan andalan (Kuncoro 2000:215).

Kawasan adalah merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (*Prime wover*) yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan dengan daerah lainnya dalam suatu provinsi, memiliki sektor unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (*hinterland*) Kuncoro 2000:215-216).

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki wilayah paling luas yaitu 1.705.832 Ha, kemudian Kabupaten Musi Banyuasin menempati urutan kedua, dan Kabupaten Banyuasin pada urutan ketiga. Dengan memiliki wilayah yang luas diharapkan Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki potensi daerah yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Jalan lintas timur merupakan jalur tercepat yang menghubungkan antara Provinsi Lampung dengan Kota Palembang, dengan adanya jalan lintas timur yang melewati wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir akan menyebabkan terjadinya arus perdagangan barang dan jasa dan memberikan dampak positif bagi wilayah ini.

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan sektor-sektor unggulan yang menunjang, sangat diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini akan tercapai otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada secara intensif agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian dan latar belakang, maka fokus penelitian adalah Analisis Sektor-sektor Unggulan dengan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi sektor ekonomi apakah yang merupakan sektor ekonomi unggulan yang ada di Kabupaten OKI dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap sektor unggulan di Kabupaten OKI.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Landasan Teori

#### a. Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Musgrave (1950: 207-208) mengemukakan bahwa kebijakan anggaran (*budget policy*) dapat mempengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama yaitu:

a) *Resources Transfer* (Perpindahan sumber daya)

Kebijakan anggaran pemerintah berupa perubahan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan terjadi pengalihan/transfer input dari perseorangan (individu/swasta) kepada masyarakat (publik). Kenaikan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang/jasa publik akan meningkatkan penyerapan input yang ada dalam perekonomian sehingga input yang dapat digunakan pihak swasta akan menurun dan sebaliknya. Dengan kata lain kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi alokasi input dalam suatu perekonomian.

b) *Incident* (Distribusi pendapatan)

Perubahan alokasi input akibat perubahan kebijakan pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Pada perekonomian yang sudah mencapai *full employment* jika pengeluaran pemerintah meningkat berarti transfer input dari swasta kepada penggunaan untuk publik sehingga pendapatan riil swasta akan menurun. Disisi lain peningkatan pengeluaran tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat (publik) sebagai balas jasa dari peningkatan penggunaan input untuk publik.

c) *Output Effect* (Perubahan Terhadap Output)

Menganalisis bagaimana fungsi pajak untuk mengatur pendapatan keuangan sebagai dasar perubahan pajak. Transfer sumber daya untuk digunakan masyarakat juga meningkat.

Perubahan kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output dalam suatu perekonomian (*Product Domestic Bruto/PDB*) maupun penerimaan riil. Seperti diketahui perubahan pengeluaran pemerintah menyebabkan adanya perubahan alokasi input yang selanjutnya mempengaruhi output yang akan dihasilkan dalam perekonomian. Perubahan di dalam distribusi dikenal sebagai timbulnya anggaran berimbang. Anggaran berimbang yaitu jumlah yang diambil pemerintah seluruhnya dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Wagner dalam Muslim, 2003: 14).

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin antara lain mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja tak terduga, belanja tak termasuk bagian lain serta bunga dan cicilan hutang. Pengeluaran pembangunan terdiri dari pembiayaan rupiah dan bantuan proyek. Sedangkan penerimaan pemerintah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain yang sah (Badan Pusat Statistik).

Berkaitan dengan pengeluaran pemerintah berlaku Hukum pengeluaran pemerintah yang makin meningkat (*Law Of Growing Public Expenditure*) atau hukum kegiatan pemerintah yang makin meningkat yang dikemukakan oleh Adolf Wagner dalam Dumaury (1999: 162), menyatakan bahwa dengan makin majunya masyarakat, makin meningkatnya jumlah penduduk, makin meningkatnya kebutuhan masyarakat maka kegiatan dan pengeluaran pemerintah juga akan semakin meningkat.

Pengeluaran pemerintah menurut Suparmoko (2000:44-45) dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pengeluaran itu merupakan suatu investasi yang menambahkan kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Dari penilaian ini dapat dibedakan macam-macam pengeluaran seperti :

1. Pengeluaran yang *Self-Liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran pajak yang lainnya akhirnya akan meningkatkan penerimaan pemerintah.
3. Pengeluaran yang tidak *Self-Liquidating* maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek turisme dan sebagainya. Dalam hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi.
4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.

Kemudian menurut Shah dalam Eddy (2005:10) pengeluaran pemerintah daerah antara lain dapat diukur berdasarkan kebutuhan fiskal (*fiscal need*) suatu daerah. Kebutuhan fiskal

adalah jumlah kebutuhan pelayanan publik standar yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan standar tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Variabel yang digunakan untuk menghitung kebutuhan fiskal antara lain pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, kesejahteraan sosial, jumlah penduduk, luas wilayah kepadatan penduduk serta pelayanan publik.

## **b. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah menurut pasal 15 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan berpedoman kepada kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Anggaran pembangunan merupakan mata rantai yang mempunyai kaitan langsung dengan kemajuan pembangunan itu sendiri, baik keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) maupun keterkaitan dengan kedepan (*forward linkage*). Dengan demikian anggaran pembangunan mempunyai dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan.

## **c. Teori Basis Ekonomi**

Richardson dalam Taroman (2000:18) mengembangkan suatu teori ekonomi regional yaitu basis ekonomi. Dalam teori basis ekonomi atau teori basis-ekspor (*economic base theory*), menyatakan bahwa penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Teori basis ekonomi ini pada intinya membedakan sektor basis dan aktifitas sektor non basis.

Aktifitas sektor basis yang mampu secara luas menjual produknya baik di dalam maupun di luar daerah akan mempengaruhi pertumbuhan sektor tersebut dan menentukan pembangunan menyeluruh bagi daerah tersebut termasuk peningkatan kesempatan kerja yang berpengaruh pada pendapatan regional. Aktifitas sektor non basis merupakan sektor sekunder yang artinya tergantung pada perkembangan yang terjadi pada sektor basis yang akan menyebabkan terjadinya perubahan pada konsumsi dan investasi di daerah. Dengan kata lain kedua sektor tersebut mempunyai hubungan dengan permintaan dari luar wilayah. Sektor

basis berhubungan secara langsung sedangkan sektor non basis berhubungan secara tidak langsung. Apabila permintaan dari luar meningkat maka sektor basis akan meningkat dan juga akan mengembangkan sektor non basis. Setiap pertumbuhan sektor basis dan non basis memiliki efek ganda terhadap perekonomian wilayah.

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini berdasarkan pada permintaan eksternal dan bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun secara global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

Cara yang paling mudah untuk menaksir besarnya basis adalah dengan jalan menghitung untuk setiap sektor yang mempunyai  $LQ > 1$ . Indeks pekerja surplus (yakni selisih antara tenaga kerja pada industri nasional yang merupakan bagian pranata bagi daerah yang bersangkutan).

Teknik LQ lebih lazim digunakan dalam studi-studi basis empiris LQ. Asumsinya adalah bahwa jika suatu daerah lebih berspesialisasi daripada daerah yang bersangkutan dalam memproduksi suatu barang tertentu, maka daerah tersebut dapat mengeksport barang itu sesuai dengan tingkat spesialisasinya dalam memproduksi barang tersebut.

#### **d. Konsep Pembangunan Regional**

Salah satu aspek pembangunan regional adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dapat berupa peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi serta perubahan status kerja buruh karena itu konsep pembangunan regional sangat tepat bila didukung dengan teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, teori pusat pertumbuhan dan pembangunan manusia.

Dari aspek ekonomi oleh Arsyad (1999:107) daerah mempunyai 3 pengertian yaitu:

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budayanya, geografis, dan sebagainya, daerah ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi, daerah ini disebut daerah nodal.
3. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara.

#### **e. Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Suatu daerah terbagi kedalam wilayah-wilayah atau sub-sub wilayah. Misalnya daerah provinsi dalam wilayah tersebut masih terbagi atas berbagai sub wilayah seperti kabupaten atau kota. Pertumbuhan daerah tersebut akan ditentukan oleh faktor-faktor utama yang antara lain: 1) sumber daya alam yang tersedia, 2) tersedianya modal bagi pengelolaan sumber daya alam, 3) adanya prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang seperti transportasi, komunikasi, 4) tersedianya teknologi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya alam, dan 5) tersedianya kualitas sumber manusia untuk pengelolaan teknologi.

Sumber daya alam dapat berupa lahan pertanian, bahan tambang atau galian yang dapat mendukung industri pengolahan atau sumber daya alam lainnya yang akan mempunyai arti penting bagi daerah yang memilikinya. Daerah tersebut akan berspesialisasi dalam suatu sub sektor atau sektor dan akan mempunyai keuntungan absolut bagi daerah lainnya. Jika daerah tersebut dikelola secara baik dengan modal dan teknologi yang memadai maka daerah tersebut dapat diharapkan akan mengalami pertumbuhan dengan pesat.

## **f. Teori Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Sektor Unggulan**

Menurut Taroman dalam tesis bahwa teori mengenai pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, model makro ekonomi dan mikro ekonomi yaitu:

1. Model makro ekonomi dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:
  - a) Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.  
Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan investasi dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP semakin menurun.  
Rostow mengatakan bahwa dalam tingkat lanjut dari pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
  - b) Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. dalam suatu perekonomian apabila perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat.
  - c) Teori Peacock dan Wiseman  
Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.
2. Model Mikro Ekonomi, untuk menganalisa faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang pemerintah (yaitu barang yang disediakan oleh pemerintah) dan menganalisa pengaruh faktor-faktor tersebut atas kesediaannya barang pemerintah, interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang pemerintah menentukan jumlah barang pemerintah yang akan disediakan melalui anggaran belanja, ini akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

## **2. Penelitian Terdahulu**

Hasanudin (2001:69-71) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah dengan hasil estimasi bantuan pemerintah pusat dan PDRB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah sedangkan PAD memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan.

Penelitian Yuliana (2004:64) menerangkan tentang sektor potensial di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan hasil perhitungan LQ sektor berpotensi untuk dikembangkan yakni sektor pertanian, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa.

Penelitian yang sama Irman (2002:49) dengan hasil sektor pertanian, sektor pembangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa daerah penelitian daerah Kabupaten OKI.

Apriliyanto (2003:56) dengan meneliti identifikasi sektor-sektor ekonomi potensi dan unggulan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yaitu hasil perhitungan LQ, sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa.

Jumarsa (2006) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan variabel yang diuji adalah jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah pegawai, jumlah penduduk miskin, dan pengeluaran daerah tahun sebelumnya. Menggunakan data time series selama periode 1993/1994 sampai dengan tahun 2000 ditujuh daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari enam

kabupaten dan satu kota dan dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif hasilnya menunjukkan bahwa luas wilayah, jumlah pegawai, penduduk miskin dan pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan.

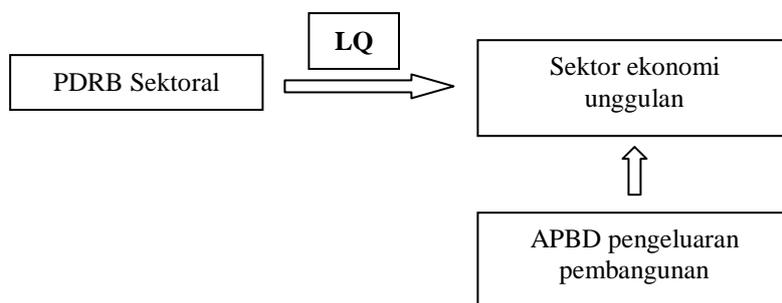
Nursyawalina (2005) dalam penelitiannya mengenai pengeluaran pemerintah daerah terhadap sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Lahat dan Muaraenim dengan kesimpulan yang didapatkan yaitu :

1. Sektor ekonomi unggulan berdasarkan perhitungan LQ untuk kabupaten Muaraenim yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor listrik, gas dan air bersih, sedangkan untuk sektor ekonomi unggulan di kabupaten Lahat yaitu sektor pertanian, bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa.
2. Dari hasil regresi sederhana, investasi pemerintah dalam pengeluaran pemerintah di daerah dengan melihat sektor unggulan sangat kecil peranannya. Hal ini terlihat dalam pengeluaran pembangunan pada sektor unggulan sangat rendah dibandingkan pendapatan (PDRB) yang dihasilkan sektor unggulan di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muaraenim sehingga pengaruh pengeluaran pembangunan tidak secara langsung pada sektor unggulan, akan tetapi pengeluaran pemerintah terfokus pada investasi publik yang memfasilitasikan pembangunan pada sarana dan prasarana infrastruktur.

Anggraini (2001) meneliti potensi sektor ekonomi unggulan di Kota Palembang (Periode 1993-2003) yaitu hasil perhitungan LQ pada tahun 1993 hingga tahun 2003 terdapat enam sektor unggulan yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi semua sektor pada tahun 1993-1996 berlangsung stabil, namun pada tahun 1997-1998 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, bahkan mencapai pertumbuhan yang negatif. Hal ini disebabkan karena adanya krisis moneter yang melanda Indonesia. Sedangkan pada tahun 1993-2003 semua sektor ekonomi mulai mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi karena mulai stabilnya keadaan perekonomian pasca krisis moneter.

**6. Alur Pikir**

Skema di menunjukkan hubungan pengeluaran pemerintah daerah terhadap sektor ekonomi unggulan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor dalam PDRB Kabupaten OKI.



**Gambar 1. Skema Alur Pikir**

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap sektor-sektor ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya sektor-sektor ekonomi unggulan tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengarahkan pembangunan ekonomi menuju perbaikan ekonomi (*economy recovery*) dengan pembangunan berkesinambungan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian ekonomi pembangunan dan keuangan daerah yang membahas mengenai masalah yang berhubungan dengan pengeluaran pemerintah dan sektor ekonomi unggulan Kabupaten OKI. Penelitian ini memfokuskan studi pada analisis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap sektor ekonomi unggulan di Kabupaten OKI. Periode waktu penelitian dalam 12 tahun terakhir yaitu 1996 sampai 2007.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang dipergunakan diperoleh dari berbagai institusi terkait yang diakui secara sah atau legal untuk menerbitkan data yang diperlukan oleh masyarakat umum, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten OKI. Selain itu data juga diperoleh melalui studi pustaka dari beberapa literatur berupa buku teks, jurnal, skripsi, tesis dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Penulis menggunakan dua pendekatan yaitu teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Teknik analisis kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan dari penelitian ini dan disesuaikan dengan teori-teori dan literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan dengan analisis kuantitatif menjelaskan berdasarkan data-data. Salah satu teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi sektor apa yang menjadi sektor-sektor unggulan di Kabupaten OKI serta Analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap sektor ekonomi unggulan.

Untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten OKI digunakan alat analisis ekonomi regional yaitu Analisis Location Quotient (LQ). Alat analisis ini digunakan untuk menentukan sektor apa saja yang merupakan sektor yang dapat mengekspor (ke luar daerah) dalam perekonomian Kabupaten OKI, yaitu suatu indikator sederhana yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah referensi (Provinsi Sumatera Selatan).

Apabila sektor memiliki nilai  $LQ > 1$ , maka sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang berpotensi untuk diandalkan sebagai pengeksport ke daerah lain dalam meningkatkan perekonomian daerahnya. Sebaliknya jika nilai  $LQ < 1$ , maka sektor tersebut bukan sektor unggulan, atau dengan kata lain daerah tersebut hanya dapat mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri. Secara matematis diformulasikan sebagai berikut (Arsyad, 1999: 154) :

$$LQ = \frac{X_{ir}/PDRBr}{X_{in}/PDRBn}$$

Keterangan: LQ = koefisien location q;  $X_{ir}$  = nilai tambah sektor i di Kabupaten OKI; PDRBr = PDRB Kabupaten OKI;  $X_{in}$  = nilai tambah sektor i di Provinsi Sumatra Selatan; dan PDRBn = PDRB Provinsi Sumatra Selatan.

### 1. Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap sektor ekonomi unggulan di Kabupaten OKI

Regresi menggambarkan pengaruh antara variabel, dalam penulisan ini variabelnya terdiri dari PDRB sektor ekonomi unggulan dan pengeluaran pemerintah dengan model regresi sederhana berikut :

$$Y = f(X) \text{ atau } Y = a + b_1 X + e$$

Keterangan: Y = PDRB sektor ekonomi unggulan Kabupaten OKI; X = Pengeluaran pemerintah; a = Konstanta; b = Koefisien (parameter yang akan diestimasi); dan e = Variabel pengganggu (*error term*)

## 2. Analisis Korelasi dan Analisis Determinasi

### b. Koefisien Korelasi (R)

Koefisien adalah untuk melihat hubungan antara dua variabel (bebas dan tidak bebas). Hasil dari koefisien korelasi (R) dapat diartikan sebagai berikut :

$R = 0$	: Tidak ada hubungan
$R < 0,5$	: Hubungan lemah
$R + 0,5$	: Hubungan cukup kuat
$R > 0.9$	: Hubungan sangat kuat

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung dan memperoleh gambaran besarnya pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB sektor ekonomi unggulan di Kabupaten OKI.

## 3. Uji t-Statistik (Uji t)

### a. Uji t

Pengujian dengan t-statistik bertujuan untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel dependen dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan, dimulai dengan mengajukan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Hipotesis tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$  maka variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta \neq 0$  maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan tingkat signifikan dan derajat kebebasan tertentu, maka kesimpulan yang dapat diambil dapat mengarah kepada kriteria sebagai berikut :

- Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka  $H_0$  ditolak dan masuk dalam daerah penolakan artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (signifikan).
- Jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka  $H_0$  diterima dan masuk dalam daerah penerimaan artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara statistik terhadap variabel terikat (tidak signifikan).

Nilai t tabel diperoleh dengan terlebih dahulu menentukan derajat kebebasan sebesar  $n-k$ , dimana  $n$  adalah tahun pengamatan yaitu 12 tahun pengamatan dan  $k$  adalah banyaknya koefisien yang terdapat dalam persamaan. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten OKI

Pada umumnya perhitungan *Location Quotient (LQ)* ini digunakan untuk melihat keunggulan sektoral dari suatu daerah dibanding daerah lainnya, disamping sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu sektor digolongkan ke dalam sektor basis atau sektor bukan basis. Besaran nilai LQ dapat digunakan sebagai indikator awal untuk melihat sektor-sektor ekonomi yang potensial (apakah memiliki atau tidak memiliki keunggulan) sektoral dibandingkan dengan keadaan secara rata-rata pada tingkat nasional (dalam hal ini Kabupaten OKI dibandingkan dengan Propinsi Sumatra Selatan).

Konsep LQ menyatakan bahwa bila besaran LQ pada suatu sektor lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ) maka sektor ekonomi ini merupakan sektor basis yang memiliki keuntungan lokasi di daerah yang bersangkutan dan kemampuan untuk mengekspor ke wilayah lain. Sektor ini sangat potensi untuk dikembangkan dan dapat menjadi tumpuan perkembangan ekonomi. Sebaliknya bila besaran LQ lebih kecil dari satu ( $LQ < 1$ ) maka menandakan bahwa sektor

tersebut bukanlah sektor basis. Sektor ini tidak memiliki keuntungan lokasi dan cenderung mengimpor dari wilayah lain karena tidak mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Dengan menggunakan data PDRB Kabupaten OKI dan PDRB Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 2004 - 2008, maka diperoleh besaran LQ masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten OKI.

**Tabel 1. Perhitungan LQ Kabupaten OKI tahun 2004-2008**

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
1. Pertanian	2,47	2,45	2,44	2,42	2,45
2. Pertambangan	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
3. Industri Pengolahan	0,48	0,48	0,59	0,48	0,49
4. Listrik,Gas,& Air Bersih	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11
5. Bangunan	1,90	1,85	1,81	1,76	1,74
6. Perdagangan,Hotel & Restoran	1,32	1,28	1,24	1,21	1,19
7. Pengangkutan & Komunikasi	0,33	0,31	0,29	0,27	0,25
8. Keuangan,Persewaan & Jasa Perusahaan	0,71	0,68	0,64	0,62	0,59
9. Jasa- Jasa	1,06	1,03	1,00	0,98	0,93

Sumber : OKI dalam angka dan Sumsel Dalam Angka, Tahun 2007/2008 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1, dari sembilan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten OKI hanya terdapat tiga sektor yang dikategorikan sebagai sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien LQ yang dimiliki sektor tersebut lebih besar dari satu yaitu masing-masing 2,45, 1,74 dan 1,17 pada sektor pertanian, sektor bangunan dan sektor perdagangan hotel dan restoran.

Sektor pertanian adalah penyumbang terbesar dari seluruh sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten OKI. Meningkatnya besaran nilai LQ pada sektor pertanian tidak terlepas karena perekonomian kabupaten OKI mempunyai sumber daya alam yang luas dan subur dan juga masyarakat dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada dengan sebaik-baiknya dan juga penggunaan pupuk,insektisida, dan penggunaan bibit yang baik yang belum secara luas dilakukan. Oleh karena itu,hal tersebut harus dipertahankan. Apabila hal tersebut dapat dipertahankan maka selanjutnya akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB kabupaten OKI.Selain itu juga tidak hanya peranan dari masyarakat kabupaten OKI itu sendiri tetapi juga dari pemerintah setempat,seperti peranannya dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi berbagai macam masalah petani dan menyediakan input untuk mengembangkan sektor pertanian di masa akan datang.

Sektor bangunan memiliki nilai LQ >1, yaitu 1,74 dengan adanya kebijakan di sektor bangunan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi cukup tinggi mengingat bahwa meningkatnya sektor bangunan, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa bukan disebabkan meningkatnya permintaan masyarakat melainkan karena tingginya intervensi pemerintah dalam pentediaan sarana umum.

Sementara ke enam sektor lainnya hanya memiliki besaran LQ yang lebih kecil dari satu ( $LQ < 1$ ) yaitu sektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas & air bersih, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa . Hal ini menandakan bahwa ke keenam sektor tersebut belum merupakan sektor basis dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten OKI masih rendah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten OKI harus lebih serius memperhatikan pertumbuhan sektor tersebut.

Bila dilihat rata-rata koefisien LQ, pada sektor pertanian sebesar 2,45 di mana pertumbuhannya juga cukup stabil. Keunggulan sektor ini dipengaruhi oleh faktor sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten OKI. Sementara pada sektor pertambangan dan penggalian, nilai koefisien LQ-nya hanya berkisar 0,07 per tahun. Sektor ini seharusnya juga

merupakan sektor unggulan mengingat keadaan geografis Kabupaten OKI yang sangat potensial untuk kegiatan pertambangan dan penggalian, namun kenyataannya sektor ini tidak banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan PDRB Kabupaten OKI. Oleh karena itu peran pemerintah seharusnya lebih giat sehingga di masa mendatang sektor ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dan dapat menjadi sektor unggulan bagi perekonomian Kabupaten OKI. Begitu juga dengan sektor ekonomi lainnya, dengan nilai koefisiennya masih kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) menandakan bahwa pengelolaan sektor tersebut belum dilaksanakan secara optimal.

**b. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten OKI**

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan anggaran pemerintah. Kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya. Pengeluaran rutin cenderung meningkat, karena semakin besarnya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung operasional pemerintahan daerah.

Pengeluaran pembangunan dalam APBD merupakan kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pembangunan terdiri atas proyek-proyek regional dan subsidi pembangunan daerah. Besarnya pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Pengeluaran Pembangunan dan Pengeluaran Rutin Di Kabupaten OKI Tahun 1996-2007 (Dalam 1000)**

Tahun	Pengeluaran Pembangunan	Pengeluaran Rutin	Pengeluaran Pemerintah
1996	27.087.844	38.385.146	65.472.990
1997	25.840.263	45.330.412	71.170.675
1998	22.574.307	47.030.777	69.605.084
1999	30.645.210	59.786.622	90.431.832
2000	30.533.176	72.610.464	103.143.640
2001	131.431.072	176.505.346	307.936.418
2002	161.408.000	191.188.589	352.596.589
2003	178.440.000	229.103.438	407.543.438
2004	205.206.000	239.059.856	444.265.856
2005	235.986.900	285.008.519	520.995.419
2006	271.384.935	313.509.371	584.894.306
2007	312.092.675	344.860.308	656.952.983

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumsel, Kab OKI Dalam Angka Tahun 1993-2007

**c. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Sektor Ekonomi Unggulan**

Untuk mengetahui hubungan antara variabel penelitian yang digunakan adalah PDRB sektor ekonomi unggulan dan pengeluaran pemerintah dengan model regresi sederhana, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0.91309E+06 + 0.37547E-02X$$

$$(0.9202E+06) \quad (0.1467E-02)$$

Keterangan: X adalah pengeluaran pemerintah; Y adalah sektor ekonomi unggulan; dan angka dalam kurung adalah nilai *standard error*.

Untuk lebih jelasnya hasil estimasi persamaan tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Hasil Regresi Dengan Menggunakan OLS  
(Tahun 1996-Tahun 2007)**

Variabel	Koefisien	t-hitung	p-Value	Signifikan
Konstanta	0.91309E+06	2,560	0,028	Signifikan
X	0.37547E-02			
R <sup>2</sup>	= 0,6589			
R <sup>2</sup> adjusted	= 0,6248			
SE of Regression	= 0.1467E-02			
DW-Statistik	= 0,8134			

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Berdasarkan persamaan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dengan koefisien estimasi (parameter) pengeluaran pemerintah bertanda positif dan signifikan sebesar 0,00375 berarti bahwa setiap pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1 persen akan menyebabkan meningkatnya sektor-sektor ekonomi unggulan Kabupaten OKI sebesar 0,00375 persen.

Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh nyata terhadap sektor-sektor ekonomi unggulan, dimana nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,560 > 2,228$ ) dengan tingkat signifikansi 95 persen ( $\alpha = 5\%$ ). Hal ini juga diperkuat dengan menggunakan Uji Park untuk menunjukkan tidak terdapatnya gejala Heteroskedastisitas di dalam persamaan sehingga menjadi signifikan. Dengan Uji Park dapat dilihat dari nilai p- value yaitu  $0,312 > 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ).

Dari hasil perhitungan *coefficient of determination* ( $R^2$ ) sebesar 0,6589 artinya bahwa 66 persen perkembangan sektor-sektor ekonomi unggulan (sektor pertanian, bangunan dan perdagangan, hotel dan restoran) di Kabupaten OKI dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, sedangkan 34 persen dipengaruhi oleh variabel lain. Sementara itu nilai  $R^2$  *adjusted* adalah 0,6248. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi variasi variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 62 persen, sedangkan sisanya 38 persen dijelaskan oleh variabel di luar persamaan. Nilai  $R^2$  yang cukup tinggi ini memperlihatkan estimasi persamaan yang dihasilkan dari penelitian ini cukup memperlihatkan keadaan yang sebenarnya (*goodness of fit*) atau cukup kuat untuk dipercaya.

Dari hasil estimasi Tabel 4.8 menunjukkan persamaan mengalami gejala autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi yang secara umum bisa dilihat apabila angka Dw berada diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi. Maka berdasarkan perhitungan dengan menggunakan regresi linear sederhana diperoleh Dw sebesar 0.8134 yang menunjukkan nilai Dw hitung  $<$  Dw tabel sehingga didapatkan asumsi bahwa nilai tersebut berada pada daerah yang tidak berkeputusan. Untuk mengatasi terjadinya Autokorelasi kemudian dicoba diperbaiki dengan metode Cochrane Orcutt, dengan  $\alpha = 5\%$ , tingkat keyakinan sebesar 95 persen dan dengan pengujian 2 sisi sehingga diperoleh t hitung  $>$  t tabel yaitu  $2,560 > 2,228$  hasilnya menjadi signifikan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil perhitungan *location quotient* ( $LQ$ ) menunjukkan bahwa selama periode 2004-2008, Kabupaten OKI memiliki tiga sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, bangunan dan perdagangan, hotel dan restoran. Selanjutnya, berdasarkan analisis kuantitatif didapat bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah signifikan terhadap sektor ekonomi unggulan Kabupaten OKI.

Diperoleh *coefficient of determination* ( $R^2$ ) sebesar 0,6589 artinya bahwa 66 persen perkembangan sektor-sektor ekonomi unggulan (sektor pertanian, bangunan dan perdagangan, hotel dan restoran) di Kabupaten OKI dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, sedangkan 34 persen dipengaruhi oleh variabel lain. Sementara itu nilai  $R^2$  *adjusted* adalah 0,6248. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi variasi variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 62 persen, sedangkan sisanya 38 persen dijelaskan oleh variabel di luar persamaan.

Berdasarkan hasil regresi terdapat masalah Autokorelasi namun dapat diatasi dengan menggunakan metode Cochrane Orcutt sehingga kemudian hasilnya menjadi signifikan.

## Saran-Saran

1. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten OKI dikarenakan sektor ini memberikan kontribusi yang paling besar pada PDRB dibandingkan dengan sektor lain. Oleh karena itu sektor ini harus menjadi prioritas untuk diberdayakan, sehingga benar-benar menjadi kokoh dan mampu menopang perekonomian masyarakat pada umumnya. Disamping itu penguatan sektor pertanian juga akan mendorong berkembangnya sektor-sektor hilir misalnya sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor-sektor lainnya. Apabila dilihat dari keadaan geografis wilayah Ogan Komering Ilir ini sangat cocok untuk sektor pertanian.
2. Untuk terus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka alokasi pengeluaran pemerintah daerah harus ditingkatkan terhadap sektor-sektor ekonomi unggulan yang terdapat di wilayah tersebut. Hal ini tentunya didukung dengan pendapatan daerah yang semakin besar sehingga bukan hanya berpengaruh pada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan yaitu sektor pertanian, bangunan dan perdagangan, hotel dan restoran saja tetapi pada sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu optimalisasi pengelolannya harus ditingkatkan lagi melalui kebijakan pemerintah setempat dengan jalan membuka akses informasi, peluang investasi, serta penyediaan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, Rika, (2001). *Potensi Sektor Ekonomi Unggulan di Kota Palembang (Periode 1993-2003)*. Skripsi. Palembang. UNSRI
- Apriliyanto, (2003). *Identifikasi Potensi Ekonomi Kota Pekalongan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.1, No.1 Maret 2003 :39051, BPFE-Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin, (1999). *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat*, Yogyakarta, STIE YKPN.
- Arsyad, Lincolin, (1999). *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Sumsel Dalam Angka Berbagai Edisi.
- Badan Pusat Statistik (BPS), OKI Dalam Angka Berbagai Edisi.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) OKI, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OKI Tahun 2004-2007.
- Bank Indonesia, 2005-2007, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah*, Vol III N0.4, Desember 2007
- Boediono, (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Dumairy, (1999). *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Hasanudin, (2001). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim*. Tesis. Palembang. Pasca Sarjana UNSRI.

- Irman, Bachrie F, (2003). *Analisis Potensi Sektoral Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan*. Kajian Ekonomi, Vol-3, No.1,2003 :77-103,Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana.UNSRI.
- Jumarsa, (2006). *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Selatan*. Tesis. Palembang. Pasca Sarjana UNSRI.
- Kuncoro Mudrajad, (2000). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan*. Dalam Prisma, April 1995, LP3ES, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajad, (2000). *Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Musgrave, Richad.A dan Peggy B Musgrave, (1991). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Musgrave, Richad A, (1959). *The Theory of Public Finance*, International Student Edition. McGraw W Hill Kogakusha, LTd.
- Muslim, (2003). *Pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKI*. Tesis. Palembang. Pasca Sarjana UNSRI.
- Muzamil, (2001). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas*. Tesis. Palembang. Pasca Sarjana UNSRI.
- Nursyawalina, (2005). *Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Sektor Ekonomi Unggulan (Lahat dan Muara Enim)*, Tesis, Palembang, Pascasarjana UNSRI.
- Oktavian, Eko.2004. *Analisis Pengeluaran Pemerintah di Bidang Infrastruku. (Studi Kasus Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)*. Tesis. Palembang. Pascasarjana UNSRI.
- Richardson H.W, (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional* : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, Sadono, (1985). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, LPFE, UI, Jakarta
- Suparmoko, (2000). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Supranto, J, (2000). *Statistik, Teori, dan Aplikasi*, Jilid I, Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Susanti, H., Moh. Iksan dan Widyanti, (2000). *Indikator-indikator Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, LPFE-UI, Jakarta.
- Taroman, Hendra, (2007). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*. Tesis. Palembang. Pasca Sarjana UNSRI.
- Todaro, Michael, (2004). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yuliana, (2001). *Analisis Sektor Potensial Kabupaten OKU Sumatera Selatan*. Tesis, Palembang. Pasca Sarjana UNSRI.
- Zen, Kosasih, M Taufiq, (2004). *Pengaruh Potensi Ekonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)* Kota Palembang. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis, Vol.6, No.1 Februari 2004, Program Pascasarjana UNSRI.